

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

LAPORAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 TPID PROVINSI JAMBI 1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta resiko ke depan Perkembangan IHK Provinsi Jambi pada akhir triwulan IV tahun 2021 terpantau mengalami inflasi sebesar 0,48 % (mtm) atau secara tahunan mengalami inflasi 1,66 % (yoy). Inflasi bulanan Provinsi Jambi lebih rendah di banding realisasi inflasi nasional sebesar 0.57% (mtm) atau 1,87% (yoy). Perkembangan inflasi Provinsi Jambi disumbang oleh Kota Jambi yang tercatat mengalami inflasi 0,48% (mtm) dengan inflasi tahunan sebesar 1,67 % (yoy), dan Kabupaten Bungo dengan inflasi sebesar 0,45 % (mtm) atau secara tahunan mengalami inflasi 1,65 % (yoy). Inflasi Kota Jambi terutama disebabkan kenaikan pada hampir semua komponen inflasi, kecuali Kelompok Pakaian dan alas kaki serta kelompok informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan yang mengalami deflasi. Untuk inflasi Kabupaten Bungo juga disebabkan kenaikan pada hampir semua komponen kecuali Kelompok Kesehatan serta Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan, inflasi terbesar pada kelompok bahan makanan, Minuman dan Tembakau.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah Yang mendorong inflasi di Provinsi Jambi berasal dari komoditas volatile foods terutama produk hortikultura, komoditas inti yaitu mobil dan bensin pada komoditas administered price. Pada kelompok volatile foods terjadi inflasi dikarenakan oleh gangguan cuaca akibat La Nina mengakibatkan resiko gagal panen yang dapat mengurangi pasokan beberapa komoditas seperti aneka cabai dan bawang yang menyebabkan lonjakan harga, dan ini juga terjadi pada produk hortikultura lainnya. Kondisi cuaca mengakibatkan gangguan pada proses produksi, distribusi dan proses penyimpanan karena produk hortikultura rentan busuk apabila kadar air tinggi/basah. Gangguan distribusi akibat curah hujan tinggi juga menjadi faktor penyebab berkurangnya pasokan mengingat produk hortikultura berasal dari luar daerah yaitu Jawa, Lampung, Bengkulu dan Sumatera Barat. Hal yang sama terjadi pada komoditas udang basah dimana curah hujan tinggi menyebabkan tingkat kematian udang tambak meningkat. Lebih lanjut, inflasi lebih tinggi didorong oleh penyesuaian tarif angkutan udara seiring dengan pembatalan implementasi PPKM level 3 yang sempat direncanakan sebagai upaya preventif menjelang HBKN Nataru pasca merendahnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah Dalam rangka memperkuat koordinasi, mengumpulkan informasi dan melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap pengendalian inflasi daerah, TPID Provinsi Jambi telah melakukan rapat koordinasi bersama OPD terkait selanjutnya juga dilakukan tinjauan ke lapangan dalam rangka stabilisasi harga dan memastikan ketersediaan stok di pasar-pasar utama di daerah Jambi. Rapat koordinasi tersebut dimaksudkan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka stabilisasi harga.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah Peran dan fungsi TPID Provinsi Jambi didorong untuk lebih diperkuat pada tahun 2022 dengan melakukan penguatan kelembagaan

TPID, peningkatan sektor produksi, efisiensi tata niaga, stabilitasi harga dan penyediaan sarana/prasaran penunjang.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah Pemerintah Daerah bersama dengan Lembaga/Instansi terkait dalam kerangka TPID kiranya mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan termasuk hortikultura, unggas dan produk turunannya, serta hasil perikanan/kelautan selama periode musim penghujan. Beberapa kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah diantaranya: Dalam jangka pendek : 1. Melakukan pengawasan terhadap ketersediaan pasokan dan cadangan pangan serta kelancaran jalur distribusi; 2. Mendorong optimalisasi operasi pasar; 3. Memastikan ketersediaan bahan bakar minyak dan gas untuk mengantisipasi kenaikan harga; 4. Menindaklanjuti terbentuknya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD); 5. Mengevaluasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) antar Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi yang sudah ada dan melakukan Kerjasama Antar Daerah khususnya untuk kelancaran distribusi komoditas pangan yang mempengaruhi angka Inflasi Daerah dari daerah surplus ke daerah defisit; 6. Menyusun dan Menetapkan Peta Jalan (ROADMAP) Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2024; dan 7. Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengantisipasi lonjakan tarif angkutan umum. Dalam jangka menengah : 1. Menyusun peta pangan strategis yang mengindikasikan posisi surplus dan defisit Provinsi Jambi, berdasarkan pada daftar komoditas penyumbang utama inflasi Provinsi Jambi; 2. Mengimplementasikan Peta Jalan (ROADMAP) Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2024, untuk menjaga Inflasi di daerah; 3. Mendorong peningkatan produksi pangan lokal serta mendorong konsumsi produk pangan lokal; 4. Melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan tentang konsumsi pangan olahan dan pangan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk pangan utama; dan 5. Melakukan manajemen persediaan untuk menghadapi lonjakan harga dengan penyediaan mesin pengawet atau cold storage.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah Pemerintah Daerah bersama dengan Lembaga/Instansi terkait dalam kerangka TPID kiranya mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan termasuk hortikultura, unggas dan produk turunannya, serta hasil perikanan/kelautan selama periode musim penghujan. Beberapa kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah diantaranya: Dalam jangka pendek : 1. Melakukan pengawasan terhadap ketersediaan pasokan dan cadangan pangan serta kelancaran jalur distribusi; 2. Mendorong optimalisasi operasi pasar; 3. Memastikan ketersediaan bahan bakar minyak dan gas untuk mengantisipasi kenaikan harga; 4. Menindaklanjuti terbentuknya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD); 5. Mengevaluasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) antar Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi yang sudah ada dan melakukan Kerjasama Antar Daerah khususnya untuk kelancaran distribusi komoditas pangan yang mempengaruhi angka Inflasi Daerah dari daerah surplus ke daerah defisit; 6. Menyusun dan Menetapkan Peta Jalan (ROADMAP) Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2024; dan 7. Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengantisipasi lonjakan tarif angkutan umum. Dalam jangka menengah : 1. Menyusun peta pangan strategis yang mengindikasikan posisi surplus dan defisit Provinsi Jambi, berdasarkan pada daftar komoditas penyumbang utama inflasi Provinsi Jambi; 2. Mengimplementasikan Peta Jalan (ROADMAP) Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2024, untuk menjaga Inflasi di daerah; 3. Mendorong peningkatan produksi pangan lokal serta mendorong konsumsi produk pangan lokal; 4. Melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan tentang konsumsi pangan olahan dan pangan alternatif untuk

mengurangi ketergantungan terhadap produk pangan utama; dan 5. Melakukan manajemen persediaan untuk menghadapi lonjakan harga dengan penyediaan mesin pengawet atau cold storage.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah Pemerintah Daerah bersama dengan Lembaga/Instansi terkait dalam kerangka TPID kiranya mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan termasuk hortikultura, unggas dan produk turunannya, serta hasil perikanan/kelautan selama periode musim penghujan. Beberapa kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah diantaranya: Dalam jangka pendek :

1. Melakukan pengawasan terhadap ketersediaan pasokan dan cadangan pangan serta kelancaran jalur distribusi;
2. Mendorong optimalisasi operasi pasar;
3. Memastikan ketersediaan bahan bakar minyak dan gas untuk mengantisipasi kenaikan harga;
4. Menindaklanjuti terbentuknya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
5. Mengevaluasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) antar Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi yang sudah ada dan melakukan Kerjasama Antar Daerah khususnya untuk kelancaran distribusi komoditas pangan yang mempengaruhi angka Inflasi Daerah dari daerah surplus ke daerah defisit;
6. Menyusun dan Menetapkan Peta Jalan (ROADMAP) Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2024; dan
7. Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengantisipasi lonjakan tarif angkutan umum.

Dalam jangka menengah :

1. Menyusun peta pangan strategis yang mengindikasikan posisi surplus dan defisit Provinsi Jambi, berdasarkan pada daftar komoditas penyumbang utama inflasi Provinsi Jambi;
2. Mengimplementasikan Peta Jalan (ROADMAP) Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2024, untuk menjaga Inflasi di daerah;
3. Mendorong peningkatan produksi pangan lokal serta mendorong konsumsi produk pangan lokal;
4. Melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan tentang konsumsi pangan olahan dan pangan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk pangan utama; dan
5. Melakukan manajemen persediaan untuk menghadapi lonjakan harga dengan penyediaan mesin pengawet atau cold storage.